

Mewujudkan Keadilan Ekonomi Melalui Perpuluhan di Era Revolusi Industri 4.0

Realizing Economic Justice Through Tithing in the Era of the Industrial Revolution 4.0

Author:

• Yushak Soesilo¹

Affiliation:

¹Sekolah Tinggi Teologi
Intheos Surakarta
yushak@sttintheos.ac.id

Dates:

Submitted:
8 September 2021
Accepted:
24 October 2021
Published:
12 November 2021

DOI:

10.46494/psc.v17i2.155

Copyright:

© 2021. The Authors.

License: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Abstract: This article aimed to study the prospect of tithe as an instrument of the church in realizing economic justice. The industrial revolution 4.0 era has resulted in economic inequality, where there are parties who can reap huge benefits from the changing working way, on the other hand there are those who must be eliminated from job competition. In this case the church is called to realize one of the Kingdom of God visions, namely justice. This study was conducted by pastoral circle or practical theological circle method. Through this study, it could be concluded that like zakat among Muslims, tithe is an instrument of the church, of which it is properly managed in accordance with the true spirit of tithing, that has the power to realize economic justice.

[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi perpuluhan sebagai instrumen gereja dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Era revolusi industri 4.0 telah menghasilkan ketimpangan dalam bidang ekonomi, di mana ada pihak yang dapat meraup keuntungan besar dari perubahan cara kerja ini, sebaliknya ada yang harus tersingkir dari persaingan kerja. Dalam hal ini gereja dipanggil untuk dapat mewujudkan salah satu visi Kerajaan Allah, yaitu keadilan. Kajian ini menggunakan metode lingkaran pastoral atau lingkaran teologi praktis. Melalui kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bagaimana zakat di kalangan umat muslim, perpuluhan adalah instrumen gereja, yang apabila dikelola dengan benar sesuai dengan semangat yang sebenarnya dari perpuluhan, yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keadilan ekonomi.]

Research Contribution: Penelitian ini menghubungkan praksis pelayanan gereja dalam hal keuangan sebagai sebuah instrumen ekonomi.

Keywords: tithing, economic justice, church, pastoral circle, industri 4.0

Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan hadirnya digitalisasi, yaitu perkembangan pesat pada *mobile internet*, produk sensor yang semakin murah, dan hadirnya kecerdasan buatan.¹ Teknologi digital dengan *hardware*, *software* dan *networking*-nya telah berkembang menjadi begitu canggih, terintegrasi, serta mengubah tatanan sosial dan ekonomi global.² Perkembangan teknologi digital tersebut berdampak pada cara kerja manusia dari pola konvensional menjadi otomatisasi dan mesin.

¹ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2016), 11-12.

² Schwab.

Perkembangan teknologi digital tentunya memiliki dampak positif, yaitu semakin membuat pekerjaan manusia terasa lebih mudah, efektif, efisien, dan juga terkoneksi satu dengan lainnya. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital tersebut berdampak pada tersingkirnya suatu kelompok masyarakat tertentu yang tidak sanggup mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang timbul di Indonesia berkaitan dengan perkembangan teknologi digital adalah dalam bidang transportasi *online*.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengenal adanya taksi *online* dan ojek *online*. Kedua jenis moda transportasi tersebut bermodalkan aplikasi digital. Keberadaan jenis transportasi ini telah merevolusi budaya transportasi masyarakat Indonesia dengan menawarkan kemudahan dalam mengaksesnya dan sekaligus dengan biaya yang terhitung murah. Permasalahannya adalah kemudian jenis moda transportasi ini mengancam kehidupan transportasi konvensional. Di beberapa tempat kita dapat mendengar adanya bentrokan antara pengemudi transportasi *online* dan pengemudi transportasi konvensional. Dari pengalaman penulis ketika berkunjung ke kota Bandung, para pengemudi ojek *online* bahkan tidak berani untuk menggunakan atribut perusahaan mereka oleh karena takut dengan ancaman dari pengemudi ojek konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemunculan transportasi *online* telah menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial.

Bagi pengemudi transportasi konvensional membuat mereka berpindah menjadi pengemudi transportasi *online* bukanlah perkara mudah. Bukan hanya karena belum tentu dapat menggunakan teknologi digital

tersebut, namun juga perlu modal yang juga tidak sedikit, misal perusahaan transportasi online biasanya mensyaratkan usia maksimal kendaraan yang boleh digunakan. Para pengemudi transportasi konvensional pada akhirnya hidup dalam keterancaman secara ekonomi dikarenakan tertatih-tatih dalam mengejar perubahan yang mungkin begitu mengejutkan mereka. Permasalahan antara taksi online dan taksi konvensional tersebut adalah merupakan salah satu contoh tersingkirnya kelompok masyarakat tertentu oleh karena dampak ketidakadilan ekonomi yang timbul dari revolusi industri 4.0. Pada akhirnya ada yang akan tersingkir dan kemudian kehilangan pekerjaannya oleh karena ketidaksiapan atau ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi.³

Kondisi tersebut adalah merupakan sebuah ketidakadilan, ketika pada satu sisi ada yang dapat memperoleh keuntungan besar dari perubahan cara kerja dan di sisi lainnya ada yang tersingkir dari pekerjaan yang selama ini menghidupinya. Meskipun tentu saja tidak perlu untuk menyalahkan perkembangan zaman ataupun menyalahkan mereka yang berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, ketidakadilan tersebut patut mendapatkan perhatian. Menyikapi permasalahan ketidakadilan ekonomi yang muncul tersebut tentu menjadi tugas gereja kemudian untuk dapat memberikan pelayanan melalui keberpihakan kepada mereka yang tersingkirkan dalam rangka memberdayakan kembali kehidupan mereka. Meminjam istilah dari Banawiratma tentang kontradiksi antara perdagangan dengan perdagangan yang adil,⁴ gereja dipanggil untuk mewujudkan ekonomi yang adil di tengah-tengah ekonomi bebas saat ini. Artikel ini akan mengkaji tanggung jawab gereja untuk mewujudkan keadilan ekonomi sebagai pengejawantahan Kerajaan Allah di bumi melalui instrumen yang sudah ada dalam

³ Banu Prasetyo and Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial," *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (November 3, 2018): 22–27, <https://doi.org/10.12962/J23546026.Y201815.4417>.

⁴ J.B. Banawiratma, *Petruk Dan MEA: Lakon Liberatif* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017), 28-29.

tradisi umat Allah itu sendiri, yaitu perpuluhan.

Terkait perpuluhan, ada beberapa penelitian atau kajian yang pernah dilakukan. Patty, dkk. dalam penelitiannya terhadap aktivitas perpuluhan jemaat GPM Bethel Allang mengungkapkan salah satu akuntabilitas perpuluhan, yaitu sebagai tanggung jawab sosial terhadap orang yang membutuhkan.⁵ Namun demikian, dalam pembahasannya tidak jelas dasar teologis yang digunakan atas akuntabilitas tersebut, dan hanya mengaitkannya dengan keberadaan umat kristiani sebagai makhluk sosial. Kajian lainnya terkait perpuluhan juga dilakukan oleh Murni H. Sitanggang.⁶ Ia mengaji perpuluhan secara biblikal dan sedikit menyinggung tentang perpuluhan tahun ketiga. Namun demikian, pembahasannya lebih banyak dilakukan dalam rangka merespon isu yang sudah umum dalam praktik perpuluhan di Indonesia, yaitu perpuluhan ditujukan untuk kepentingan pelayanan gerejawi beserta dengan berbagai motivasi yang dianggap tidak benar dalam memberikan perpuluhan. Penelitian atau kajian lainnya yang penulis temukan terkait perpuluhan lebih banyak terkait tinjauan terhadap kewajiban memberikan perpuluhan, dan penulis belum menemukan kajian perpuluhan dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi.

Metode

Kajian dalam artikel ini menggunakan metode lingkaran teologi praktis atau disebut juga lingkaran pastoral. Lingkaran teologi praktis dapat dianggap sebagai sebuah grounded

theory approach yang berdasarkan dialektika antara sumber data (dalam hal ini konteks) dan sumber pengetahuan (dalam hal ini teks).⁷ Yang dimaksud sebagai konteks dalam hal ini adalah konteks kehidupan yang saat ini digumuli, sedangkan teks bukan hanya merujuk pada teks Alkitab semata, tetapi juga berbagai jenis pendapat teologis dari para teolog. Tahap-tahap dalam lingkaran pastoral adalah 1) observasi atau deskripsi; 2) analisis; 3) interpretasi atau refleksi teologis; 4) aksi, rencana aksi.

Tahap deskripsi dan analisis tidak dipisahkan secara tajam, dan dalam hal ini penulis mengimplementasikannya dalam bagian pendahuluan artikel secara sederhana namun merupakan realitas yang diamati dan dialami.⁸ Tahap interpretasi teologis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu interpretasi teologi, eklesiologi, dan misiologi. Dalam interpretasi teologi, penulis menawarkan gagasan Allah yang bukan hanya berpihak kepada yang lemah, namun Ia sendiri adalah pihak yang lemah itu sendiri, sehingga menolong yang lemah adalah sama dengan menolong Allah sendiri. Dalam interpretasi eklesiologi, penulis mengangkat gereja sebagai komunitas yang peduli terhadap orang miskin, dan dalam interpretasi misiologi, penulis mengusulkan suatu misiologi yang sifatnya transformatif. Setelah melalui tahap interpretasi tersebut, penulis mengangkat praktik perpuluhan sebagai bagian dari rencana aksi yang nyata, yang dihasilkan dari interpretasi teologi, eklesiologi, dan misiologi sebelumnya.

⁵ Agustina Christina Patty and Gugus Irianto, "Akuntabilitas Perpuluhan Gereja," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 2 (2013): 177–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7191>.

⁶ Murni H. Sitanggang, "Teologi Biblika Mengenai Perpuluhan," *VERITAS* 12, no. 1 (2011): 19–37.

⁷ Emanuel Gerrit Singgih, "Lingkaran Teologi Praktis Sebagai Model Berteologi Kontekstual Di Indonesia," in

Vivat Crescat Floreat: Belajar & Bertumbuh Bersama, Refleksi Atas Setengah Abad PERSETIA, ed. Yusak Soleiman, Hendrik Ongirwalu, and Epifania L.M. Raintung (Jakarta: BPK Gunung Mulia - Persetia, 2014), 100-101.

⁸ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.

Pembahasan

Allah yang Menderita (Teologi)

Konteks keadilan ekonomi tidak dapat kita lepaskan dari perwujudan Kerajaan Allah. Dan konsep Kerajaan Allah tidak dapat dipahami tanpa melihat pada hidup dan karya Yesus. Yesus menyebut Kerajaan Allah sebagai Kerajaan Anak Manusia (Mat. 13:41). Ia juga menyebutnya sebagai Kerajaan-Ku (Luk. 22:30). Pelayanan Yesus dikukuhkan dalam pidato-Nya dalam Lukas 4:18-19, “Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”

Sharon H. Ringe sebagaimana dikutip oleh Paulus S. Widjaja menyebut dalam pidato pengukuhan tersebut terdapat tiga ciri utama Yobel: pengumuman tentang pemerintahan Allah, kabar baik bagi orang miskin, dan deklarasi pembebasan kepada mereka yang dalam penindasan.⁹ Tujuan mendasar dari Yobel itu sendiri adalah sebagai bentuk solidaritas untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan di antara umat Israel dan sekaligus untuk mencegah penimbunan properti oleh orang kaya serta mengurangi orang miskin sebagai penyewa yang tidak mempunyai tanah.¹⁰ Ide Kerajaan Allah sebagai satu perwujudan solidaritas dapat kita temukan dari pemberitaan Yohanes Pembaptis, “barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian” (Luk. 3:11). Konsep solidaritas dalam Kerajaan Allah juga terlihat dari kehidupan pelayanan Yesus sendiri di

mana Ia mengatakan bahwa “serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya” (Luk. 9:58). Demikian juga kepada orang muda kaya yang ingin mengikut-Nya, Yesus memberikan persyaratan untuk menjual semua hartanya dan membagikan kepada orang miskin (Mat. 19:21). Aloysius Pieris membagi kemiskinan dalam dua kategori, dalam kaitannya dengan kepedulian terhadap kaum miskin, yaitu kemiskinan sukarela dan kemiskinan yang dipaksakan.¹¹ Pieris memandang bahwa kemiskinan sukarela adalah merupakan perwujudan Kerajaan Allah untuk membebaskan kemiskinan yang dipaksakan. Untuk membebaskan kemiskinan yang dipaksakan tersebut Yesus dan para pengikut-Nya tidaklah hanya berjuang menjadi miskin tetapi berjuang bagi kaum miskin.¹²

Dalam pengajaran-Nya, Yesus juga menyatakan penolakan yang tegas terhadap mamon dan menunjukkan bahwa pengabdian kepada mamon adalah suatu bentuk perlawanan terhadap Allah (Mat. 6:24; Luk. 16:13). Dalam Injil Lukas penolakan terhadap mamon tersebut kemudian dilanjutkan dengan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin (Luk. 16:19-31). Pada akhir hidupnya setelah kematian orang kaya menderita sengsara di alam maut, sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dalam kisah tersebut tidaklah disebutkan mengenai moralitas orang kaya maupun orang miskin tersebut. Yang nampak dari kisah tersebut adalah ketidakpedulian dari orang kaya tersebut terhadap Lazarus si miskin yang setiap hari mengais remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dalam kisah tersebut terlihat jelas bahwa ketidakpedulian terhadap orang miskin, yang dengan moralitas apapun, akan mendatangkan hukuman.

Hal yang sama juga terlihat dari ketika Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai orang

⁹ Paulus S. Widjaja, *Keadilan Allah Dalam Kitab-Kitab Injil Sinoptik* (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2013), 62.

¹⁰ John E. Hartley, *Word Biblical Commentary: Leviticus*. (Dallas: Word Books Publisher, 2002), 443.

¹¹ Aloysius Pieris, *Berteologi Dalam Konteks Asia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), 47-48.

¹² Pieris, 40.

miskin dan orang-orang yang sedang menderita. Dalam Matius 25:31-46 Yesus menghubungkan penghakiman terakhir dengan kepedulian terhadap orang-orang miskin dan yang menderita. Mereka yang memberi makan orang-orang yang lapar, memberi minum orang-orang yang haus, memberi tumpangan orang asing, memberi pakaian orang yang telanjang, melawat orang yang sakit dan orang yang di dalam penjara disebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan baik kepada Yesus sendiri, dan oleh karenanya berhak menerima Kerajaan yang telah disediakan. Sebaliknya mereka yang tidak berbuat demikian juga tidak berbuat baik kepada Yesus dan oleh karenanya masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Dalam hal ini terlihat bahwa Tuhan tidak hanya di pihak si penolong, namun ia sendiri adalah pihak yang ditolong itu.¹³ Menurut Song justru di sinilah komponen khas Kerajaan Allah menurut Yesus, yaitu orang-orang yang miskin dan menderita.¹⁴

Yewangoe berpendapat bahwa penampilan refleksi teologis mengenai Allah yang menderita dipandang luar biasa, mengingat kebanyakan agama di Asia beranggapan sebaliknya.¹⁵ Secara khusus dalam kebanyakan ajaran Kristen, Yewangoe melihat kesamaan dengan aliran Buddha Maitreya yang meyakini dan mengharapkan Mesias yang akan mengantarkan ke sorga/nirwana, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan sehingga tidak perlu upaya menciptakan perubahan

masyarakat.¹⁶ Namun demikian, sebagaimana pandangan Lee, Allah yang menderita merupakan keunikan dan menganggap Kristus menderita hanya dalam wujud kemanusiaannya saja adalah tidak tepat.¹⁷ Kristus bukan hanya secara personal mengalami penderitaan, melainkan berwujud dalam sosok-sosok yang mengalami penderitaan sebagaimana kesaksian dalam Matius 25:31-46. Menurut Yang sebagaimana dikutip Yewangoe, salib Yesus adalah lambang Kerajaan Allah yang terwujud dalam berbagai masalah manusia.¹⁸ Menurutnya, memberlakukan tindakan-tindakan Allah di tengah-tengah orang yang menderita sama artinya dengan mewujudkan Allah yang berbelarasa dalam penderitaan tersebut.

Gereja yang Berpihak Kepada yang Miskin (Ekslesiologi)

Dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, diperlukan suatu komunitas yang peduli dan berjuang bagi orang miskin. Untuk itu gereja harus menjadi *church of the poor*, yang melihat orang-orang miskin berdiri pada posisi Yesus dan dengan demikian keadilan dan kemurahan menjadi dimensi utama sebagai pengikut Kristus.¹⁹ Upaya pembebasan dari penderitaan melalui kegiatan sosial dan perwujudan keadilan adalah wujud identifikasi diri sebagai Kristus.²⁰ Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa Yesus bukan hanya melayani melainkan berbagi hidup bersama kaum miskin.²¹

¹³ Emanuel Gerrit Singgih, "Allah Dan Penderitaan Di Dalam Refleksi Teologis Rakyat Indonesia: Sebuah Evaluasi Teologis," in *Teologi Bencana: Pergumulan Iman Dalam Konteks Bencana Alam Dan Bencana Sosial*, ed. Ati Hildebrant Rambe, Markus Hildebrant Rambe, and Jilles DeKlerk (Makassar: Oase INTIM, 2006), 267.

¹⁴ Choan-Seng Song, *Yesus Dan Pemerintahan Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 44.

¹⁵ A.A. Yewangoe, *Theologia Cruxis Di Asia: Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 322.

¹⁶ Arthur Aritonang, "Book Review: Teologi Cruxis Di Asia Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia

Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 17, no. 1 (May 2021): 98–101, <https://doi.org/10.46494/PSC.V17I1.124>.

¹⁷ Yewangoe, 323.

¹⁸ Yewangoe, 291.

¹⁹ Stan Chu Ilo, "The Church of the Poor: Towards an Ecclesiology of Vulnerable Mission," *Ecclesiology* 10, no. 2 (2014): 229–50, <https://doi.org/10.1163/17455316-01002006>.

²⁰ Ilo.

²¹ Ricardo Antoncich, *Iman & Keadilan: Ajaran Sosial Gereja Dan Praksis Sosial Iman* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), 26.

Banawiratma sendiri membagi orang miskin ke dalam dua kategori, yaitu kaum miskin fisik dan kaum miskin Injili.²² Kaum miskin fisik adalah mereka yang menjadi korban, sedangkan kaum miskin Injili adalah pengikut Yesus dan mereka yang menolak mamon. Kaum miskin Injili dapat membentuk suatu basis yang disebut sebagai komunitas basis sekunder, di mana mereka meskipun tidak miskin namun berorientasi pada pemberdayaan kaum miskin.²³ Namun demikian, meskipun membentuk suatu komunitas, kedua kelompok orang miskin tersebut tetap menyatu dan bersekutu dalam hidup menggereja dan tidak bersifat eksklusif.

Persekutuan bersama antara kaum miskin fisik dan kaum miskin Injili terlihat dalam kehidupan jemaat yang pertama di Yerusalem. Gereja yang ideal dalam berbagi terlihat dalam Kisah Para Rasul 2:41-47. Jemaat mula-mula hidup dalam persekutuan dan saling berbagi baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan sosial. Dua hal tersebut muncul bak dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan yang membuat kehidupan mereka sebagai kehidupan yang disukai oleh semua orang.²⁴ Mereka bertekun dalam liturgi gerejawi dan sekaligus dalam kepedulian sosial, di mana jemaat yang kaya merelakan hartanya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang miskin. Tujuannya tentu saja agar tercipta suatu keadilan ekonomi, di mana tidak terdapat jurang pemisah antara mereka yang kaya dan yang miskin.

Banawiratma mengatakan bahwa perayaan komunal (liturgi gerejawi) dan keterlibatan sosial merupakan suatu ibadah kepada Allah.²⁵ Keduanya tidak dapat dipisahkan. Perayaan

komunal mencegah keterlibatan sosial menjadi mesianisme patologis (hanya saya/kita yang dapat menyelamatkan dunia),²⁶ sedangkan perayaan yang sungguh-sungguh, menurut Kevin Seasoltz sebagaimana dikutip oleh Banawiratma, haruslah tumbuh dari kehidupan dan menolong orang ke dalam transformasi kehidupan.²⁷ Pandangan-pandangan tersebut menjadi suatu refleksi komunitas iman yang ideal sebagaimana yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul.

Visi Keadilan Ekonomi (Misiologi)

Dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, maka tidak dapat tidak harus berupaya mengatasi jurang antara si kaya dan si miskin. Dan untuk mengatasi jurang antara si kaya dan si miskin tersebut maka harus ada langkah kongkret dalam rangka pemberdayaan orang miskin. Upaya pemberdayaan kaum miskin tersebut adalah merupakan wujud dari sikap mendahulukan orang miskin. Banawiratma dengan merujuk pada kebaikan hati orang Samaria mengatakan bahwa, “mencintai sesama berarti menjadi sesama bagi orang yang setengah mati, tak berdaya, tanpa pertolongan. *Preferential option for the poor* adalah wujud mencintai sesama sebagaimana Yesus mencintai.”²⁸

Pilihan untuk mendahulukan orang miskin bukanlah berarti tidak memperhitungkan atau mengecualikan orang kaya dalam karya penyelamatan Allah. Singgih meluruskan adanya anggapan bahwa sikap mendahulukan orang miskin berarti Injil menjadi milik eksklusif orang miskin dan bahwa orang Kristen sejati harus menjadi miskin sebagai anggapan yang keliru. Baginya sikap mendahulukan orang miskin adalah sama seperti sikap orang tua yang

²² J.B. Banawiratma, *10 Agenda Pastoral Transformatif* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 17.

²³ Banawiratma, 16.

²⁴ Yushak Soesilo, “Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136, <https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.172>.

²⁵ Banawiratma, *10 Agenda Pastoral Transformatif*, 47-48.

²⁶ Banawiratma.

²⁷ Banawiratma, 50.

²⁸ J.B. Banawiratma and J Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 134.

lebih memperhatikan anak yang lebih lemah dibandingkan dengan anak yang lebih kuat, dan hal itu bukanlah dipandang sebagai bentuk ketidakadilan.²⁹ Menurutnya hal itu dapat dijelaskan baik dari perkataan Yesus mengenai “orang yang sehat tidak perlu tabib” maupun pendapat Paulus dalam 1 Korintus 15:23-24 di mana anggota-anggota yang tidak elok diberi perhatian khusus.³⁰ Selain itu juga didasarkan pada pemikiran bahwa orang miskin tidak mungkin dapat menyesuaikan diri dengan yang kaya, namun sebaliknya orang yang kaya dapat menyesuaikan dengan orang yang miskin.³¹

Paus Fransiskus sebagaimana dikutip oleh Purwatma bahkan menyebut bahwa keberpihakan pada kaum miskin lebih kepada kategori teologis dibandingkan dengan kategori budaya, sosiologis, politis atau filosofis.³² Menurutnya, keberpihakan pada kaum miskin bahkan merupakan kategori teologis yang utama oleh karena alasan bahwa Anak Allah telah merendahkan diri dan menjadi miskin sepanjang perjalanan hidup bersama manusia.³³ Sementara itu Gutierrez bahkan berpendapat bahwa keberpihakan pada orang miskin adalah unsur esensial bagi pewartaan Injil di mana di dalam Injil terdapat suara Allah yang menyerukan keadilan dan kesamaan martabat bagi semua orang.³⁴

Lebih jauh Banawiratma menyebut bahwa pilihan untuk mendahulukan orang miskin menjadi spiritualitas gereja, yang disebutnya sebagai spiritualitas kesetiakawanan sosial.³⁵ Spiritualitas ini bersumber dari kesetiakawanan Allah sendiri, yaitu dalam

wujud Firman Allah yang menjadi manusia, yang kemudian menjadi ciri khas keterlibatan orang Kristen dalam upaya pembebasan manusia.³⁶ Spiritualitas ini menganggap orang-orang miskin dan yang menderita bukan sebagai objek amal, namun sebagai saudara seperjuangan untuk pembebasan, atau istilah yang digunakan oleh Banawiratma adalah pertobatan. Yang dimaksudkan adalah bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kemiskinan mengalami pertobatan oleh karena tidak lagi mengabdikan kepada mamon, dan secara bersamaan juga untuk memperjuangkan pembebasan mereka yang dalam kemiskinan.

Pilihan untuk mendahulukan orang miskin selanjutnya dapat diwujudkan dalam pelayanan diakonia gereja. Singgih menyebut bahwa diakonia yang dilakukan harus bersifat karitatif, reformatif, dan sekaligus juga transformatif.³⁷ Diakonia karitatif berarti memberi pertolongan langsung; diakonia reformatif adalah memberikan pendidikan; sedangkan diakonia transformatif adalah memperjuangkan kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.³⁸ Pelayanan diakonia tersebut tentunya akan dapat memberdayakan ekonomi orang miskin demi terwujudnya ekonomi yang adil. Pemerintahan Allah menciptakan suatu budaya pemberdayaan sehingga mereka yang miskin dan lembah dapat berdiri di atas kaki sendiri dan mencari nafkahnya sendiri.³⁹

²⁹ Emanuel Gerrit Singgih, *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 214.

³⁰ Singgih.

³¹ Singgih.

³² Matheus Purwatma, “Berteologi Bersama Kaum Miskin: Tanggapan Bagi Teologi Kontekstual Masa Kini,” in *Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi*, ed. Wahyu S. Wibowo and Robert Setio (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016), 84.

³³ Purwatma.

³⁴ Purwatma, 86.

³⁵ Banawiratma and Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, 139.

³⁶ Banawiratma and Muller.

³⁷ Emanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks Di Awal Milenium III* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 63.

³⁸ Singgih.

³⁹ Song, *Yesus Dan Pemerintahan Allah*, 199-201.

Aksi Konkrit

Keadilan Ekonomi dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam ada suatu karakteristik yang menjamin terwujudnya keadilan dalam ekonomi, yaitu ekonomi keseimbangan. Yang dimaksud dengan ekonomi keseimbangan adalah pandangan yang meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan, di mana ekonomi ini tidak mendholimi masyarakat khususnya yang lemah.⁴⁰ Prinsip tersebut tentu saja berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis yang dianggap tidak adil terhadap yang lemah, dan juga sistem ekonomi sosialis yang dianggap berbuat dholim kepada hak individu. Dalam hal ini tentu saja berarti bahwa tetap menghargai dan mengakui hak milik individu namun demikian dengan juga memperhatikan mereka yang lemah. Dalam ekonomi keseimbangan tersebut distribusi ekonomi menjadi instrumen penting dalam terwujudnya ekonomi yang adil dalam Islam. Landasan penting yang dijadikan dasar dalam konsep distribusi adalah Q.S. al Hasyr (59):7, “supaya harta itu jangan beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu.” Dengan demikian, dalam ekonomi Islam tidak dibenarkan adanya penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu saja dan sebaliknya juga tidak memaksakan individu-individu harus berada dalam taraf yang sama.⁴¹ Oleh karena itu distribusi ekonomi harus dilakukan secara adil sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat dan mempersempit jurang pemisah kaya-miskin.

Dalam prinsipnya keadilan distribusi dalam Islam memiliki beberapa maksud.⁴² Pertama,

Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam memperoleh kekayaan sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Kedua, pembagian kekayaan nasional secara adil. Ketiga, Islam tidak menghendaki pertumbuhan kekayaan yang jauh melampaui batas-batas kepatutan. Dengan demikian, Islam menuntut adanya jaminan dan kepastian bahwa setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya dapat mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi demi terwujudnya kemakmuran bersama.

Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam meliputi zakat, wakaf, waris, infaq dan sedekah.⁴³ Zakat adalah model distribusi wajib individu; wakaf adalah model distribusi individu untuk masyarakat; waris adalah model distribusi dalam keluarga; infaq dan sedekah adalah model distribusi di masyarakat. Dalam artikel ini hanya akan membahas tentang zakat untuk kemudian didialogkan dengan konsep perpuluhan dalam tradisi Alkitab sebagai bentuk rencana aksi dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Zakat adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslim karena merupakan rukun Islam yang keempat. Dengan demikian, meskipun memiliki kemiripan dengan pajak yang ditarik oleh pemerintah, zakat memiliki makna yang berbeda dengan pajak. Perbedaan maknanya terutama adalah ada nilai ibadah di dalam pelaksanaan zakat. Kewajiban membayar zakat tertulis dalam Q.S. at-Taubah (9):103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman

⁴⁰ Abd Aziz, “Sistem Ekonomi Islam Solusi Perekonomian Indonesia,” *Iqtisodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (February 1, 2017): 1–16, <http://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/71>.

⁴¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87-88.

⁴² Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (December 24, 2016), <https://doi.org/10.24235/AMWAL.V8I2.990>.

⁴³ Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, 98-127.

jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.” Dari ayat tersebut terlihat bahwa tujuan zakat bagi orang yang melakukannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

Zakat memiliki banyak dimensi. Dalam dimensi sosial zakat ditunaikan dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Dalam dimensi moral zakat bermanfaat untuk menghapus sifat tamak, sedangkan dalam dimensi ekonomi zakat mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Besarnya zakat yang wajib diberikan bervariasi, mulai dari 2,5%, 5%, sampai dengan 10% bergantung dari harta yang dizakatkan. Pada saat ini di Indonesia zakat yang dikelola oleh lembaga resmi pengelola zakat adalah zakat profesi. Zakat profesi diberikan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor yang diperoleh dari pekerjaan yang halal.⁴⁴ Sedangkan dasar hukum pendistribusian zakat secara jelas tertuang dalam Q.S. at-Taubah (9):60, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu kewajiban yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dengan demikian, secara garis besar zakat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dapat dalam bentuk bantuan modal, bantuan biaya pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, dsb, yang pada intinya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang lemah.

Yang tidak kalah penting dalam hal pendistribusian zakat adalah peran lembaga

pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat telah dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara independen. Lembaga pengelola zakat tersebut dibentuk tentu saja dengan tujuan agar potensi zakat yang besar di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dapat digunakan sebesar-besarnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁴⁵ Namun demikian, pada kenyataannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut terutama karena para pemberi zakat lebih suka secara langsung menyalurkan zakatnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketidakpercayaan pada lembaga pengelola zakat.⁴⁶

Perpuluhan sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Ekonomi

Dalam tradisi kekristenan, khususnya yang bersumber dari tatanan masyarakat Perjanjian Lama, terdapat suatu persembahan wajib yang harus dipersembahkan oleh umat Allah untuk diserahkan ke Bait Suci maupun kepada orang-orang miskin, yaitu perpuluhan atau persepuluhan. Sebagaimana rujukan di dalam Maleakhi 3:8-12, tidak memberikan persembahan perpuluhan dianggap sebagai perbuatan menipu Allah dan perbuatan tersebut mendatangkan kutuk kepada umat Allah. Sebaliknya, dengan membawa perpuluhan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka umat Allah dijanjikan akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Perpuluhan itu sendiri sudah dikenal sejak jaman bapa leluhur Israel (Kej. 14:20; 28:22) dan kemudian menjadi bagian dari hukum resmi dalam Taurat (Im. 27:30-33). Dalam Kitab Imamat tersebut perpuluhan wajib diberikan karena dianggap sebagai milik Allah sehingga harus dikembalikan kepada Allah.

Persembahan perpuluhan diambil 10% dari segala berkat yang diterima oleh umat Allah

⁴⁴ Gin Gin Muhamad Ridwan, “Komparasi Zakat Profesi Dalam Agama Islam Dan Persepuluhan Dalam Agama Kristen Protestan,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 3 (September 2021): 195–208, <https://doi.org/10.15575/JPIU.12769>.

⁴⁵ Clarashinta Cangghih et al., “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2017): 14, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>.

⁴⁶ Cangghih et al.

dalam bentuk apapun. Umat Allah membawa perpuluhan pada tahun pertama, kedua, keempat, dan kelima ke Bait Allah. Sedangkan perpuluhan pada tahun ketiga dan keenam diberikan kepada orang-orang Lewi, orang-orang asing, para janda, dan para anak yatim yang ada di kota-kota mereka (Ul. 14:22-29). Pada tahun ketujuh tidak dipersembahkan perpuluhan oleh karena tahun itu adalah tahun sabat, tahun di mana diberikan perhentian kepada tanah-tanah di Israel sehingga tidak mendatangkan hasil apapun. Penentuan tahun ketiga dan keenam tersebut mengacu kepada tahun di mana keluarga Yakub tinggal di Mesir oleh karena bencana kelaparan yang terjadi. Persembahan tersebut sering disebut sebagai *triennial poor tithe* (perpuluhan tahun ketiga bagi orang miskin). Menurut Mayes, *triennial poor tithe* bukanlah bentuk persembahan ekstra namun perpuluhan tahunan dengan peruntukan yang berbeda.⁴⁷

Apabila kita memperhatikan struktur Ulangan 14:22–15:23 menarik bahwa persembahan perpuluhan (14:22-29) dan persembahan sulung (15:19-23) diletakkan pada bingkai upaya-upaya pembebasan kaum miskin dan kaum yang lemah (15:1-19). Dengan demikian melalui struktur teks tersebut dapat disimpulkan bahwa persembahan perpuluhan merupakan suatu instrumen yang dimaksudkan sebagai upaya pembebasan umat Allah dari kemiskinan. Hal tersebut terlihat juga dari penerima perpuluhan adalah orang-orang Lewi, orang-orang asing, para janda, dan anak yatim, yang adalah mewakili orang-orang yang miskin pada saat itu.

Upaya untuk menolong kaum miskin dengan instrumen perpuluhan tahun ketiga dan keenam juga masih terus terjadi dalam komunitas Yahudi pada abad pertama Masehi.

Bahkan masih ditambah dengan memberikan separuh dari perpuluhan tahun kedua kepada orang miskin.⁴⁸ Dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, tidak ada aturan pasti atau disebutkan mengenai kewajiban perpuluhan. Yesus menyinggung perpuluhan dalam kaitannya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membayar perpuluhan namun mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan (Mat. 23:23). Tulisan Ibrani juga menyinggung tentang perpuluhan, namun dalam konteks membandingkan antara Kristus dengan Melkisedek (Ibr. 7:1-10). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Paulus tidak mengajarkan tentang perpuluhan. Mungkin saja bahwa hal tidak disinggungnya perpuluhan oleh karena tidak lagi membatasi persembahan hanya dalam bentuk perpuluhan saja dan bahkan menekankan pada “siapa yang menabur banyak akan beroleh banyak” (bdk. 2 Kor. 9:6-14). Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Paulus tersebut mengandung konsep keseimbangan melalui persembahan yang dikumpulkan dari jemaat di Korintus untuk jemaat di Yerusalem yang miskin. Meskipun tentu saja tidak seberapa, namun persembahan tersebut dapat menjadi model dari suatu instrumen pembagian dana bagi yang menderita.⁴⁹

Apabila kita mendialogkan upaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui zakat dalam Islam dengan perpuluhan, maka kita akan menjumpai adanya kemiripan di antara keduanya. Perpuluhan adalah juga merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, paling tidak hal itu masih tetap diyakini di kalangan Gereja Pentakosta/Karismatik (GPK) sampai saat ini. Fakta tersebut terkonfirmasi dari artikel Kees de Jong yang juga merupakan kesimpulan dari kegiatan penelitian di beberapa GPK.⁵⁰ Di GPK

⁴⁷ Duane L. Christensen, *Word Biblical Commentary : Deuteronomy 1-21:9* (Dallas: Word Books Publisher, 2002), 304.

⁴⁸ Widjaja, *Keadilan Allah Dalam Kitab-Kitab Injil Sinoptik*, 26-27.

⁴⁹ Ulrich Beyer and Evalina Simamora, *Memberi Dengan Sukacita: Tafsir Dan Teologi Persembahan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 129.

⁵⁰ Kees de Jong, “Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal-Karismatik,” in *Spiritualitas Dari Berbagai*

perpuluhan sangat ditekankan dan di dalamnya berlaku prinsip tabur tuai. Pendeta Pentakostal biasa secara rutin meminta perpuluhan, yang diambil dari 10% pendapatan kotor jemaat, dan menjanjikan hasil berupa berkat jasmani dan rohani bagi yang mau melakukannya.⁵¹ Pada banyak kalangan Pentakosta-Karismatik, kelahiran baru selain dimaknai dengan meninggalkan dosa, juga dengan ketaatan dalam membayar perpuluhan dan bersedekah.⁵² Bahkan ada juga dari kalangan Karismatik yang berpendapat bahwa karunia Roh Kudus diberikan kepada mereka yang telah menjadi orang Kristen yang taat dengan bukti indikasi tekun berdoa, rajin pergi ke gereja, dan membayar perpuluhan.⁵³ Dengan demikian sama seperti zakat, perpuluhan selain sebagai instrumen bantuan sosial bagi kaum miskin, juga mengandung nilai religius yang di dalamnya terdapat suatu janji berkat bagi yang melakukannya, terlepas dari untuk apa kemudian perpuluhan digunakan. Mereka yang memberikan perpuluhan mengimani bahwa apa yang dilakukan tersebut mendatangkan berkat Tuhan, tanpa merasa berhak tahu perpuluhan yang mereka berikan akan digunakan untuk apa. Bagi mereka, yang penting telah menunaikan kewajiban, sedangkan penggunaan perpuluhan dipahami mereka sebagai tanggung jawab si pengelola terhadap Tuhan.

Bagi jemaat GPK, memberi perpuluhan kepada Allah (baca: pendeta) akan mendatangkan berkat yang besar.⁵⁴ Dengan pemahaman yang demikian, ada potensi dana besar yang dapat terhimpun melalui perpuluhan. Namun demikian, cukup disayangkan bahwa dana

yang besar tersebut tidak terdistribusi secara adil sebagaimana sebenarnya semangat perpuluhan dalam Alkitab. Pada praktiknya, terutama di GPK, perpuluhan adalah menjadi hak sepenuhnya pendeta (gembala sidang). Dan kemudian, pendeta juga memberikan perpuluhan kepada sinode, yang pada umumnya digunakan untuk membiayai operasional sinode. Distribusi dana perpuluhan yang tidak sesuai dengan semangat yang terkandung Alkitab tersebut itulah yang kemudian memunculkan pendeta-pendeta Pentakosta/Karismatik yang kaya raya maupun *mega churches* yang berdiri megah oleh karena menguasai sepenuhnya dana yang dihimpun dari perpuluhan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu distribusi yang adil diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan professional terhadap dana perpuluhan yang dihimpun agar tidak terkumpul hanya pada satu pihak saja. Song mengatakan bahwa tanpa adanya lembaga atau istitusi maka pemerintahan Allah tidak dapat diwujudkan.⁵⁵ Dengan demikian untuk mewujudkan pemerintahan Allah tersebut dapat diupayakan dengan pembentukan lembaga pengelola perpuluhan minimal dimulai dari tingkat sinode dan kemudian apabila terus berkembang dengan baik dapat dipertimbangkan pembentukan lembaga pengelola perpuluhan secara ekumenis di tingkat nasional. Pentingnya pembentukan lembaga pengelola perpuluhan di samping agar terdistribusi secara lebih luas adalah juga untuk menjaga martabat baik si pemberi maupun si penerima. Kontak langsung antara pemberi dan penerima dapat menimbulkan rasa malu pada

Tradisi, ed. J.B. Banawiratma and Hendri M. Sendjaja (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), 300.

⁵¹ Frederick Klaitz and Shenita A. Mclean, "Valuing Black Lives: Pentecostalism, Charismatic Gifts, and Human Economies in a U.S. Inner City," *American Ethnologist* 42, no. 4 (2015): 610–23, <https://doi.org/10.1111/amet.12159>.

⁵² Juliette Koning and Gwenaël Njoto-Feillard, "Introduction: New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia," *New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral*

Complexities in Southeast Asia, 2017, 1–15, https://doi.org/10.1007/978-981-10-2969-1_1.

⁵³ Juliette Koning, Heidi Dahles, and Heidi Dahles, "Spiritual Power. Ethnic Chinese Managers and the Rise of Charismatic Christianity," *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 27, no. 1 (May 2009): 5, <https://doi.org/10.22439/cjas.v27i1.2174>.

⁵⁴ de Jong, "Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal-Karismatik."

⁵⁵ Song, *Yesus Dan Pemerintahan Allah*, 193.

diri si pemberi, dan sebaliknya juga dapat menimbulkan rasa direndahkan pada pihak penerima dana tersebut. Oleh karenanya adanya lembaga yang dapat menjadi pengantara antara pemberi dan penerima akan dapat menjaga martabat dan kehormatan masing-masing pihak. Pembentukan lembaga tersebut juga sekaligus sesuai dengan perintah Yesus bahwa sedekah diberikan bukan untuk mencari pujian dari manusia. Sedekah yang baik adalah sedekah yang diberikan tanpa diketahui oleh banyak orang (Mat. 6:1-4).

Dengan mengacu kepada distribusi perpuluhan dalam Perjanjian Lama tersebut, di mana dari enam tahun pengumpulan dana perpuluhan, empat tahun perpuluhan diserahkan ke Bait Allah, dan dua tahun perpuluhan ditaruh di kota masing-masing, maka untuk saat ini dapat diatur misalkan jemaat menyerahkan 2/3 dari perpuluhannya kepada gereja atau pendeta, dan 1/3 bagian dari perpuluhannya diserahkan kepada lembaga pengelola perpuluhan. Demikian juga pendeta menyerahkan 2/3 perpuluhannya ke sinode dan 1/3 perpuluhannya ke lembaga pengelola perpuluhan. Dana yang terhimpun tersebut kemudian harus terdistribusi dengan adil untuk dapat benar-benar dinikmati oleh kaum miskin dan kaum yang rentan. Pendeta yang hidupnya masih dalam kategori miskin juga tetap berhak untuk menerimanya, apabila menganalogikan bahwa pendeta adalah kelompok Lewi yang tidak memperoleh bagian tanah pusaka dan mengabdikan hidupnya dalam pelayanan kepada Tuhan, yang dengan demikian dikategorikan sebagai kaum miskin.

Pemanfaatan dana tersebut harus meliputi tiga aspek, yaitu aspek karitatif, reformatif, dan transformatif. Bantuan yang bersifat karitatif dapat berupa bantuan langsung tunai atau barang-barang kebutuhan pokok. Bantuan yang bersifat reformatif dapat berupa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, misalnya dalam penggunaan teknologi digital, pelatihan keterampilan kerja, maupun dapat juga berupa bantuan beasiswa untuk

pendidikan baik formal maupun informal. Sedangkan bantuan yang bersifat transformatif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha baik dalam bentuk uang maupun barang-barang pendukung kerja. Selain itu dana yang terhimpun dapat juga digunakan untuk membentuk koperasi-koperasi yang akan dapat membantu memberdayakan usaha dan kehidupan mereka yang miskin maupun kaum yang rentan.

Pada akhirnya, lembaga pengelola perpuluhan tersebut harus dijalankan secara profesional dan disertai dengan kontrol yang ketat sebagaimana pada umumnya lembaga-lembaga keuangan. Hal itu penting untuk dilakukan demi menjaga kepercayaan para pemberi perpuluhan bahwa perpuluhan yang mereka setorkan dikelola secara jujur dan didistribusikan secara adil sesuai dengan tujuannya. Jika tidak demikian, maka dapat terjadi para pemberi perpuluhan lebih suka memberikan perpuluhannya langsung kepada kaum miskin. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pemerintah agar dapat dibuatkan regulasi yang mengatur tata kelola lembaga tersebut yang disertai dengan sanksi hukum pidana yang tegas apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan pengelolaannya. Selain itu, lembaga pengelola keuangan dapat juga mengikuti regulasi yang telah ada yang berkaitan dengan tata kelola lembaga keuangan. Dengan dikelola secara professional, maka dana perpuluhan yang terhimpun dapat digunakan dengan baik untuk membantu kaum miskin dan kaum yang rentan, bukan saja di kalangan umat Kristiani namun juga secara luas masyarakat umum juga dapat menikmati manfaatnya, sehingga secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bangsa yang berkeadilan.

Kesimpulan

Sebagaimana zakat dalam Islam yang menjadi instrumen dalam distribusi ekonomi, maka perpuluhan juga adalah instrumen yang sama untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi

umat Kristiani. Jika sepenuhnya mendasarkan penerapan penghimpunan perpuluhan pada Alkitab, maka dana besar yang terhimpun tersebut tidak akan hanya dinikmati oleh gereja atau pendeta saja tetapi dapat dinikmati sebagai bagian dari upaya menolong dan memberdayakan kaum miskin dan kaum yang rentan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kejujuran dari pihak pemberi dan pengelola perpuluhan, profesionalitas pengelola perpuluhan, serta tidak mengabaikan kerjasama dengan pemerintah sebagai pembuat dan pengawas regulasi lembaga keuangan. Apabila semua itu dapat berjalan dengan baik, maka perpuluhan bukan hanya akan mendatangkan berkat bagi pemberi, namun juga berkat bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan pertolongan.

Referensi

- Antoncich, Ricardo. *Iman & Keadilan: Ajaran Sosial Gereja Dan Praksis Sosial Iman*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (December 2016). <https://doi.org/10.24235/AMWAL.V8I2.990>.
- Aritonang, Arthur. "Book Review: Teologi Crucis Di Asia Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia." *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 17, no. 1 (May 2021): 98–101. <https://doi.org/10.46494/PSC.V17I1.124>.
- Aziz, Abd. "SISTEM EKONOMI ISLAM SOLUSI PEREKONOMIAN INDONESIA." *Iqtisodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (February 2017): 1–16.
- Banawiratma, J.B. *10 Agenda Pastoral Transformatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- . *Petruk Dan MEA: Lakon Liberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- Banawiratma, J.B., and J Muller. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Beyer, Ulrich, and Evalina Simamora. *Memberi Dengan Sukacita: Tafsir Dan Teologi Persembahan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, and Ach. Yasin. "POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 2017): 14. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>.
- Christensen, Duane L. *Word Biblical Commentary : Deuteronomy 1-21:9*. Dallas: Word Books Publisher, 2002.
- Hartley, John E. *Word Biblical Commentary: Leviticus*. Dallas: Word Books Publisher, 2002.
- Ilo, Stan Chu. "The Church of the Poor: Towards an Ecclesiology of Vulnerable Mission." *Ecclesiology* 10, no. 2 (2014): 229–50. <https://doi.org/10.1163/17455316-01002006>.
- Jong, Kees de. "Spiritualitas Gerakan-Gerakan Pentakostal-Karismatik." In *Spiritualitas Dari Berbagai Tradisi*, edited by J.B. Banawiratma and Hendri M. Sendjaja. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017.
- Klaits, Frederick, and Shenita A. Mclean. "Valuing Black Lives: Pentecostalism, Charismatic Gifts, and Human Economies in a U.S. Inner City." *American Ethnologist* 42, no. 4 (2015): 610–23. <https://doi.org/10.1111/amet.12159>.
- Koning, Juliette, Heidi Dahles, and Heidi Dahles. "Spiritual Power. Ethnic Chinese Managers and the Rise of Charismatic Christianity." *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 27, no. 1 (May 2009): 5. <https://doi.org/10.22439/cjas.v27i1.2174>.
- Koning, Juliette, and Gwenaël Njoto-Feillard. "Introduction: New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia." *New Religiosities, Modern Capitalism, and Moral Complexities in Southeast Asia*, 2017, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2969-1_1.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Patty, Agustina Christina, and Gugus Irianto. "AKUNTABILITAS PERPULUHAN GEREJA." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 2 (2013): 177–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/ja>

- mal.2013.08.7191.
- Pieris, Aloysius. *Berteologi Dalam Konteks Asia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL." *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (November 2018): 22–27. <https://doi.org/10.12962/J23546026.Y2018I5.4417>.
- Purwatma, Matheus. "Berteologi Bersama Kaum Miskin: Tangangan Bagi Teologi Kontekstual Masa Kini." In *Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi*, edited by Wahyu S. Wibowo and Robert Setio. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016.
- Ridwan, Gin Gin Muhamad. "Komparasi Zakat Profesi Dalam Agama Islam Dan Persepuluhan Dalam Agama Kristen Protestan." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 3 (September 2021): 195–208. <https://doi.org/10.15575/JPIU.12769>.
- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.
- Singgih, Emanuel Gerrit. "Allah Dan Penderitaan Di Dalam Refleksi Teologis Rakyat Indonesia: Sebuah Evaluasi Teologis." In *Teologi Bencana: Pergumulan Iman Dalam Konteks Bencana Alam Dan Bencana Sosial*, edited by Ati Hildebrant Rambe, Markus Hildebrant Rambe, and Jilles DeKlerk. Makassar: Oase INTIM, 2006.
- . *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- . "Lingkaran Teologi Praktis Sebagai Model Berteologi Kontekstual Di Indonesia." In *Vivat Crescat Floreat: Belajar & Bertumbuh Bersama, Refleksi Atas Setengah Abad PERSETIA*, edited by Yusak Soleiman, Hendrik Ongirwalu, and Epifania L.M. Raintung. Jakarta: BPK Gunung Mulia - Persetia, 2014.
- . *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi Dalam Konteks Di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Sitanggang, Murni H. "Teologi Biblika Mengenai Perpuluhan." *VERITAS* 12, no. 1 (2011): 19–37.
- Soesilo, Yushak. "Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136. <https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.172>.
- Song, Choan-Seng. *Yesus Dan Pemerintahan Allah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Widjaja, Paulus S. *Keadilan Allah Dalam Kitab-Kitab Injil Sinoptik*. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2013.
- Yewangoe, A.A. *Theologia Crusis Di Asia: Pandangan-Pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagaman Di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.